



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan jabatan fungsional baru untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang serta adanya penyesuaian bobot beban kerja, kondisi kerja dan pertimbangan objektif lainnya untuk beberapa jabatan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan

ts

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 14);
6. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/59/SJ tanggal 7 Januari 2021 perihal Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2021 Nomor 14), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Februari 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ADLY AMRAN,

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 21 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR 4



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 6 TAHUN
2021 TENTANG BESARAN TAMBAHAN
PENGHASILAN UNTUK APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG
PANJANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA SERTA
KELANGKAAN PROFESI

NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp)
Sekretaris Daerah	15	20.000.000
Asisten	14	13.600.000
Inspektur	14	13.500.000
Kepala BAPPEDA, Kepala BPKD dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	13.000.000
Eselon II.b lainnya	14	12.500.000
JF Dokter/Dokter Gigi Utama Sub Spesialis	14	25.500.000
JF Dokter / Dokter Gigi Utama Spesialis	14	20.500.000
JF Dokter / Dokter Gigi Utama	14	11.500.000
Staf Ahli	13	12.000.000
Kabag Setdako	12	8.000.000
Camat	12	10.000.000
Direktur RSUD	12	8.200.000
JF Dokter-Dokter Gigi Madya Sub Spesialis	12	25.000.000
JF Dokter-Dokter Gigi Madya – Spesialis	12	20.000.000
JF Dokter-Dokter Gigi Madya	12	8.800.000
Sekretaris Inspektorat	12	7.700.000
Sekretaris Bappeda/Dinas Dukcapil dan BPKD	12	7.600.000
Sekretaris SKPD lainnya	12	7.500.000
Kabag Set DPRD	11	7.000.000
Inspektur Pembantu	11	7.400.000
Eselon III.b pada Bappeda/ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/BPKD	11	6.500.000

Eselon...

Eselon III.b	11	6.000.000
Administrator Kesehatan Ahli Madya	11	4.200.000
Analisis Kebijakan Ahli Madya / Madya	11	4.200.000
Apoteker Madya	11	4.200.000
Auditor Ahli Madya	11	6.000.000
Bidan Madya	11	4.200.000
Guru Madya Penerima Tunjangan Profesi	11	1.500.000
Guru Madya	11	4.200.000
Nutrisionis Madya	11	4.200.000
Pamong Belajar Madya	11	4.200.000
Pengawas Sekolah Madya Penerima Tunjangan Profesi	11	1.600.000
Pengawas Sekolah Madya	11	4.300.000
Penyuluh Pertanian Madya	11	4.200.000
Perawat Ahli Madya	11	4.200.000
Perawat Madya	11	4.200.000
Psikolog Klinis Madya	11	4.200.000
Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Madya	11	5.800.000
Fisioterapis Madya	11	4.200.000
Pengelola Pengadaan Barang Jasa Madya	11	4.200.000
Sanitarian Madya	11	4.200.000
Pranata Laboratorium Kesehatan Madya	11	4.200.000
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya	11	4.200.000
Penata Anestesi Madya	11	4.200.000
Pembimbing Kesehatan Ahli Madya	11	4.200.000
Analisis Anggaran Madya	11	4.200.000
Analisis Hukum Madya	11	4.200.000
Analisis Intelijen Madya	11	4.200.000
Analisis Kebakaran Madya	11	4.200.000
Analisis Kebencanaan Madya	11	4.200.000
Analisis Ketahanan Pangan Madya	11	4.200.000
Analisis Pasar Hasil Pertanian Madya	11	4.200.000
Analisis Pemantau Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Madya	11	4.200.000
Analisis Perkarantina Tumbuhan Madya	11	4.200.000
Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian Madya	11	4.200.000
Pamong Budaya Madya	11	4.200.000
Polisi Pamong Praja Madya	11	4.200.000
Arsiparis Madya	11	4.200.000
Asesor Sumber Daya Manusia Madya	11	4.200.000
Pengawas Koperasi Madya	11	4.200.000

4.200.000

Pengawas...

Pengawas Perdagangan Madya	11	4.200.000
Penyuluh Lingkungan Hidup Madya	11	4.200.000
Penyuluh Perindustrian Madya	11	4.200.000
Penyuluh Sosial Madya	11	4.200.000
Pembina Jasa Konstruksi Madya	11	4.200.000
Pemeriksa Pajak Madya	11	4.200.000
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Madya	11	4.200.000
Penata Penanggulangan Bencana Madya	11	4.200.000
Penata Ruang Madya	11	4.200.000
Pengembang Kurikulum Madya	11	4.200.000
Pengendali Dampak Lingkungan Madya	11	4.200.000
Penguji Perangkat Telekomunikasi Madya	11	4.200.000
Penilai Pemerintah Madya	11	4.200.000
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya	11	4.200.000
Perencana Madya	11	4.200.000
Perisalah Legislatif Madya	11	4.200.000
Pranata Hubungan Masyarakat Madya	11	4.200.000
Pranata Komputer Madya	11	4.200.000
Pranata Siaran Madya	11	4.200.000
Pustakawan Madya	11	4.200.000
Statistisi Ahli Muda / Muda	11	4.200.000
Teknik Tata Bangun dan Perumahan Madya	11	4.200.000
Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda / Muda	11	4.200.000
Teknik Pengairan Ahli Muda / Muda	11	4.200.000
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda / Muda	11	4.200.000
Pejabat Fungsional Madya Yang Menjadi Koordinator	11	6.000.000
Dokter-Dokter Gigi Muda Spesialis	10	16.200.000
Dokter-Dokter Gigi Muda Sub Spesialis	10	16.800.000
Dokter-Dokter Gigi Muda	10	6.400.000
Lurah	9	6.000.000
Eselon IV.a pada Sekretariat Daerah	9	5.200.000
Eselon IV.a pada Inspektorat	9	5.100.000
Eselon IV.a pada Bappeda/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil/BPKD	9	5.000.000
Eselon IV.a	9	4.850.000
Eselon IV selaku Kepala UPTD	9	5.200.000
Dokter-Dokter Gigi Pertama Sub Spesialis	9	16.300.000

Dokter...

ts

Dokter-Dokter Gigi Pertama Spesialis	9	16.000.000
Dokter-Dokter Gigi Pertama	9	6.400.000
Apoteker Muda	9	3.700.000
Pamong Belajar Muda	9	3.900.000
Perawat Muda	9	3.700.000
Penyuluh Pertanian Muda	9	3.700.000
Psikolog Klinis Muda	9	4.900.000
Pengelola Pengadaan Barang Jasa Muda	9	3.700.000
Sanitarian Muda	9	3.700.000
Bidan Muda	9	3.700.000
Fisioterapis Muda	9	3.700.000
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	9	3.700.000
Administrator Kesehatan Ahli Muda	9	3.700.000
Penata Anestesi Muda	9	3.700.000
Guru Muda Penerima Tunjangan Profesi	9	1.350.000
Adyatama Kepariwisataaan Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Anggaran Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Hukum Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Intelijen Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Kebakaran Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Kebencanaan Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Kebijakan Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Keuangan Pusat Dan Daerah Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Pasar Hasil Pertanian Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Pemantau Peraturan Perundang-Undangan Legislatif Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Perkarantinaaan Tumbuhan Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Analisis Sarana dan Prasarana Pertanian Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Arsiparis Muda	9	3.700.000
Asesor SDM Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Auditor Ahli Muda	9	3.700.000
Auditor Muda	9	3.700.000
Guru Muda	9	3.700.000
Medik Veteriner Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Nutrisisionis Muda	9	3.700.000

3,7

4,9

4,9

Pamong...

Pamong Budaya Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Pembimbing Kesehatan Ahli Muda/Muda	9	3.700.000
Pembina Jasa Kontruksi Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Pemeriksa Pajak Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Penata Ruang Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Pengawas Koperasi Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Pengawas Perdagangan Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	9	3.700.000
Pengembang Kurikulum Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Penguji Perangkat Telekomunikasi Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Penilai Pemerintah Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Penyuluh Perindustrian Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Penyuluh Sosial Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda/ Muda	9	3.700.000
Perawat Ahli Muda	9	3.700.000
Perencana Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Perisalah Legislatif Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Polisi Pamong Praja Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Pranata Komputer Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Pranata Laboratorium Kesehatan Muda	9	3.700.000
Pranata Siaran Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Pustakawan Muda	9	3.700.000
Statistisi Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda/ Muda	9	3.700.000
Teknik Pengairan Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Teknik Penyehatan Lingkungan Ahli Muda /Muda	9	3.700.000
Teknik Tata Bangun dan Perumahan Ahli Muda / Muda	9	3.700.000
Widyaprada Ahli Muda / Muda	9	3.700.000

Auditor...

60

Auditor Kepegawaian Ahli Muda	9	3.700.000
Pejabat Fungsional Muda / Ahli Muda Yang Menjadi Sub Koordinator pada Sekretariat Daerah	9	5.200.000
Pejabat Fungsional Muda / Ahli Muda Sub Koordinator Kegiatan pada Inspektorat	9	5.100.000
Pejabat Fungsional Muda / Ahli Muda Yang Menjadi Sub Koordinator pada Bappeda, dan Dinas Kependudukan dan Capil / BPKD	9	5.000.000
Pejabat Fungsional Muda / Ahli Muda Yang Menjadi Sub Koordinator	9	4.850.000
Pejabat Fungsional Muda / Ahli Muda Yang Menjadi Kepala UPTD	9	5.200.000
Pejabat Fungsional Muda / Ahli Muda Yang Menjadi Kepala Tata Usaha UPTD	9	4.600.000
Eselon IV.b	8	4.650.000
Apoteker Pertama	8	3.600.000
Bidan Pertama	8	3.600.000
Pranata Laboratorium Kesehatan Pertama	8	3.600.000
Fisioterapis Pertama	8	3.600.000
Penyuluh Pertanian Pertama	8	3.600.000
Pengelola Pengadaan Barang Jasa Pertama	8	3.600.000
Teknik Pengairan Pertama	8	3.600.000
Penata Ruang Pertama	8	3.600.000
Auditor Kepegawaian Pertama	8	3.600.000
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli	8	3.600.000
Administrator Kesehatan Ahli Pertama	8	3.600.000
Auditor Pertama	8	4.500.000
Guru Pertama Penerima Tunjangan Profesi	8	1.350.000
Penyuluh Pertanian Penyelia	8	3.300.000
Nutrisionis Pertama	8	3.300.000
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8	3.300.000
Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama	8	3.300.000
Perawat Ahli Pertama	8	3.300.000
Perawat Gigi Penyelia	8	3.300.000
Perawat Penyelia	8	3.300.000
Perawat Pertama	8	3.600.000
Asisten Penata Anestesi Penyelia	8	3.300.000
Asisten Apoteker Penyelia	8	3.300.000
Penata Anestesi Pertama	8	3.600.000

3,6

3,7

Perekam...

ts

Perekam Medis Penyelia	8	3.300.000
Radiografer Penyelia	8	3.300.000
Pranata Laboratorium Kesehatan Penyelia	8	3.300.000
Sanitarian Pertama	8	3.600.000
Sanitarian Penyelia	8	3.300.000
Fisioterapis Penyelia	8	3.300.000
Nutrisisionis Penyelia	8	3.300.000
Epimolog Kesehatan Ahli Pertama	8	3.300.000
Bidan Penyelia	8	3.300.000
Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama	8	3.600.000
Staf/ Jabatan Pelaksana D-4, S1, S2 pada Sekretariat Daerah	7	
- Golongan IV	7	3.850.000
- Golongan III	7	3.400.000
Staf/ Jabatan Pelaksana D-4, S1, S2 pada Inspektorat	7	
- Golongan IV	7	3.800.000
- Golongan III	7	3.350.000
Staf/Jabatan Pelaksana D-4, S1, S2 pada Bappeda/ Disdukcap/BPKD	7	
- Golongan IV	7	3.750.000
- Golongan III	7	3.250.000
Staf/Jabatan Pelaksana D-4, S1, dan S2		
- Golongan IV	7	3.700.000
- Golongan III	7	3.200.000
Arsiparis Pelaksana Lanjutan / Mahir	7	3.200.000
Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan	7	3.200.000
Bidan Pelaksana Lanjutan	7	3.200.000
Guru	7	3.200.000
Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan	7	3.200.000
Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	3.200.000
Perawat Mahir	7	3.200.000
Perawat Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	3.200.000
Perekam Medis Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	3.200.000
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan	7	3.200.000
Pustakawan Pelaksana Lanjutan	7	3.200.000
Radiografer Pelaksana Lanjutan	7	3.200.000
Asisten Penata Anestesi Pelaksana Lanjutan	7	3.200.000
Teknisi Elektromedis Pelaksana Lanjutan	7	3.200.000
Fisioterapis Pelaksana Lanjutan	7	3.200.000

Guru Penerima Tunjangan Profesi	7	1.275.000
Sanitarian Pelaksana Lanjutan	7	3.200.000
Auditor Pelaksana	6	3.300.000
Tekhnik Jalan dan Jembatan Terampil	6	2.950.000
Asisten Apoteker Pelaksana	6	2.950.000
Asisten Penata Anestesi Pelaksana	6	2.950.000
Perekam Medis Pelaksana/Terampil	6	2.950.000
Bidan Pelaksana/Terampil	6	2.950.000
Radiografer Pelaksana	6	2.950.000
Nutrisisionis Pelaksana	6	2.950.000
Perawat Gigi Pelaksana	6	2.950.000
Perawat Pelaksana	6	2.950.000
Perawat Terampil	6	2.950.000
Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana / Terampil	6	2.950.000
Asisten Penata Anestesi Terampil	6	2.950.000
Terapis Transfusi Darah Pemula	6	2.950.000
Staf/Jabatan Pelaksana D-3 pada Sekretariat Daerah	6	
- Golongan IV	6	3.850.000
- Golongan III	6	3.400.000
- Golongan II	6	3.050.000
Staf/ Jabatan Pelaksana D-3 pada Inspektorat	6	
- Golongan IV	6	3.800.000
- Golongan III	6	3.350.000
- Golongan II	6	3.000.000
Staf/ Jabatan Pelaksana D-3 pada Bappeda/ Disdukcapil/BPKD		
- Golongan IV	6	3.750.000
- Golongan III	6	3.250.000
- Golongan II	6	2.950.000
Staf/ Jabatan Pelaksana D-3		
- Golongan IV	6	3.700.000
- Golongan III	6	3.200.000
- Golongan II	6	2.900.000
Staf/Jabatan Pelaksana Pendidikan SLTA/SLTP/SD pada Sekretariat Daerah		
- Golongan III	5	3.400.000
- Golongan II	5	3.050.000
- Golongan I	5	2.850.000
Staf/Jabatan Pelaksana Pendidikan SLTA/SLTP/SD pada Inspektorat		
- Golongan III	5	3.350.000

Golongan...

As

- Golongan II	5	3.000.000
- Golongan I	5	2.800.000
Staf/Jabatan Pelaksana Pendidikan SLTA/SLTP/SD pada Bappeda/ Disdukcapil/BPKD		
- Golongan III	5	3.250.000
- Golongan II	5	2.950.000
- Golongan I	5	2.750.000
Staf/Jabatan Pelaksana Pendidikan SLTA/SLTP/SD		
- Golongan III	5	3.200.000
- Golongan II	5	2.900.000
- Golongan I	5	2.700.000
Pengemudi Ambulan	4	2.800.000

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA (DIBERIKAN SEBAGAI TAMBAHAN DARI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA)

DIBERIKAN KEPADA PEJABAT / STAF DENGAN KONDISI KERJA TERTENTU SEBAGAI TAMBAHAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA	
Kuasa Bendahara Umum Daerah	2.000.000
Pengurus Barang Pengelola	1.500.000
Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas	1.500.000
Pejabat Fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai TU Puskesmas	900.000
Staf/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKD	300.000
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD	700.000
Sekretariat PPK SKPD	620.000
Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pengeluaran Pembantu	
Dengan Anggaran Belanja Diatas 50M selain belanja pegawai	2.300.000
Dengan Anggaran Belanja 10M s/d 50M selain belanja pegawai	1.600.000
Dengan Anggaran Belanja 5M s/d 10M selain belanja pegawai	1.150.000
Dengan Anggaran Belanja 0 s/d 5M selain belanja pegawai	900.000

+ PPK
Um
6.500.000

Bendahara...

Bendahara Penerimaan / Penerimaan Pembantu	
Dengan Target Penerimaan Per Tahun Diatas 5M	1.400.000
Dengan Target Penerimaan Per Tahun 1M Sampai 5M	1.150.000
Dengan Target Penerimaan Per Tahun sampai 1M	900.000
Bendahara Penerima SKPKD	1.400.000
Pengurus Barang Pengguna / Pengurus Barang Pembantu	
Dengan Aset/Barang Dikelola Diatas 50M	1.400.000
Dengan Aset/Barang Dikelola 10M Sampai 50M	1.150.000
Dengan Aset/Barang Dikelola Sampai Dengan 10M	900.000
Pembantu Pengurus Barang Pengelola	700.000
Sekretaris pribadi, Ajudan dan Sopir Walikota, Ketua DPRD	1.600.000
Sekretaris pribadi, Ajudan dan Sopir Wakil Walikota, Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua DPRD	1.100.000
Kepala Sekolah, Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala UPTD SKB	650.000
Kepala UKPBJ	2.000.000
Kepala Bidang yang menjalankan fungsi pengelolaan pasar	2.000.000
Kepala Seksi yang menjalankan fungsi pengelolaan pasar	400.000
Pengawas Rumah Dinas, Rumah Jabatan	600.000
Pengemudi	800.000
Verifikatur/ Admin TPP	500.000
Pokja Pengadaan pada UKPBJ	2.800.000

TAMBAHAN...



TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA (DIBERIKAN SEBAGAI TAMBAHAN DARI TPP BERDASARKAN BEBAN KERJA, KELANGKAAN PROFESI DAN KONDISI KERJA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN)

Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perhitungan dan pembayarannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN berpedoman pada Peraturan Menteri Kesehatan 28 th 2014 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional

WALIKOTA PADANG PANJANG

FADLY AMRAN

